

IMPLEMENTASI STRATEGI DISPERINDAGKOP UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENGOPTIMALKAN DIGITALISASI UMKM KOTA SAMARINDA DI ERA PANDEMI COVID-19

Melsy Vanesa Sarai¹, Fajar Apriani²

¹²Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Corresponding Author : vanesamelsy@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to determine the implementation of strategies for optimizing digitalization in MSMEs in Samarinda City by the East Kalimantan Province UKM Disperindagkop UKM and identify inhibiting factors in the implementation of the East Kalimantan Province UKM Disperindagkop SME strategy. The research approach used is descriptive qualitative with interactive model analysis data analysis techniques. The research results show that the implementation of the strategy by the East Kalimantan Province Disperindagkop UKM has run optimally. Digitalization is a step for the East Kalimantan Province Disperindagkop UKM in empowering MSME players in the era of the Covid-19 Pandemic. However, in its implementation there were several obstacles found in the implementation process, namely MSME players who experienced problems with the unstable internet network in certain places, there were still MSME players who chose to sell conventionally, and there were still MSME players who did not understand how to use digital technology.*

Keywords: Strategy Implementation, Digitalization, MSMEs

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi dalam mengoptimalkan digitalisasi pada UMKM di Kota Samarinda oleh Disperindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur dan mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dalam implementasi strategi Disperindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi strategi oleh Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim telah berjalan secara optimal. Digitalisasi merupakan langkah bagi Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim dalam melakukan pemberdayaan pada para pelaku UMKM di era Pandemi Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam proses implementasinya yaitu para pelaku UMKM yang mengalami kendala pada jaringan internet yang kurang stabil di tempat tertentu, masih adanya pelaku UMKM yang memilih berjualan secara konvensional, serta Masih terdapat UMKM yang tidak paham dalam memanfaatkan teknologi digital.

Kata Kunci : Implementasi Strategi, Digitalisasi, UMKM

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 menghambat berjalannya bisnis UMKM ke Indonesia. Hal ini membatasi ruang gerak bisnis UMKM dalam memasarkan produknya dikarenakan adanya berbagai kebijakan-kebijakan seperti physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam hal ini dibutuhkan strategi dari pemerintah yang inovatif untuk dapat membangkitkan kembali sektor ekonomi yang juga merupakan sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Adapun upaya pemerintah yang dilakukan yaitu pada 14 Mei 2020 Launching pertama Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GERNAS BBI) dimana program ini memanfaatkan platform digital serta media sosial dalam memasarkan produk-produk negeri yang lebih memudahkan pembayaran serta pemasaran yang luas (Biro Komunikasi, 2021). Selain itu, Roadmap digitalisasi juga dicanangkan oleh Kemntrian Koperasi dan UKM dalam meningkatkan UMKM agar mampu bertahan di era pandemi covid-19. Kota Samarinda merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terdampak covid-19 paling tinggi pada UMKM yaitu berjumlah 158.624 UMKM.

Digitalisasi merupakan salah satu jalan keluar untuk mempertahankan perekonomian khususnya kepada pelaku usaha UMKM. Namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat hambatan-hambatan yaitu rendahnya pemahaman terhadap manfaat teknologi informasi dalam pengembangan usaha karena umumnya pelaku UMKM di Kota Samarinda belum memiliki bagian khusus mengelola secara daring untuk memperluas pasarnya. Selain itu, adanya keraguan dari para UMKM di Kota Samarinda untuk melakukan media daring dalam perkembangan usahanya dikarenakan faktor lingkup konsumen yang penggunaan teknologi informasi tidak terlalu luas (Nugroho dkk., 2019).

Dalam hal ini, sejalan dengan strategi Disperindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur yaitu "Pemberdayaan Pengembangan Koperasi dan UKM yang berdaya saing, mandiri dan sehat untuk pertumbuhan perekonomian daerah" dengan salah satu arah kebijakannya yakni peningkatan daya saing UKM diarahkan pada kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui fasilitasi, dorongan pengembangan, kreasi/inovasi, pengembangan produksi, peningkatan pasar dan akses informasi serta pemanfaatan teknologi dimana dengan mengadopsi penggunaan teknologi digital untuk diadaptasikan kepada para UMKM di Kota Samarinda sehingga mengarah pada ekosistem digital untuk dapat bertahan di masa pandemi Covid-19.

Sejumlah penelitian mengenai implementasi strategi UMKM dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi (Hardilawati, 2020; Astuti dkk., 2020; Novita, 2021) menunjukkan bahwa implementasi strategi dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi oleh UMKM yaitu UMKM harus melakukan penjualan dan pemasaran produk secara online dengan memanfaatkan teknologi digital dan melakukan peningkatan akses permodalan melalui peningkatan skala produksi serta menopang UMKM untuk terjun ke *e-commerce*. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji upaya-upaya Disperindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan strategi optimalisasi digitalisasi UMKM Kota Samarinda di era pandemi Covid-19 beserta faktor-faktor penghambatnya.

Kerangka Teori

Manajemen Strategi

Menurut Pearce & Robinson dalam Suci (2015) manajemen strategi merupakan rangkaian keputusan dan formulasi yang menjadi satu sehingga menghasilkan pelaksanaan dari rencana-rencana yang dibuat untuk mencapai sebuah tujuan.

Selanjutnya, pendapat Schuler dalam Yunus (2016) mengemukakan bahwa manajemen strategi adalah sebuah titik temu yang dirumuskan suatu organisasi yang berkaitan dengan sumber daya, keahlian internal, kesempatan serta resiko yang didapati dari lingkungan eksternal.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, rumusan, hingga pada pengambilan keputusan organisasi yang berisi sasaran-sasaran dan visi organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai ataupun yang diharapkan. Manajemen strategi memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu program maupun mengatur segala kesatuan organisasi yang diharapkan aktif dalam membangun dan mengembangkan organisasi dan pembangunan nasional serta membentuk kinerja organisasi menjadi lebih baik.

Implementasi Strategi

Dalam Wheelen and Hunger (2004) mengartikan implementasi strategi adalah “*Strategy implementation is the process by which strategies and policies are put into action through the development programs, budgets, and procedures*”. Artinya adalah implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan diwujudkan melalui program, anggaran, dan prosedur pembangunan.

Sedangkan Ilham., dkk (2022) menuliskan implementasi Strategi adalah sebuah proses kegiatan yang terencana, saling menyesuaikan berinteraksi untuk mengembangkan suatu kebijakan dalam menyempurnakan suatu program agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Maka berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi merupakan kegiatan-kegiatan atau bagian kunci (key part) yang berorientasi pada strategi sehingga dapat menggerakkan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam strategi suatu organisasi. Inti dari definisi ini adalah adanya tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya.

Dalam Wheelen and Hunger (2004) implementasi strategi memiliki beberapa 3 (tiga) unsur dalam implementasi strategi diantaranya meliputi Program-program (*Programs*), Anggaran (*Budgets*) dan Prosedur (*Procedures*) yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program-Program (*Programs*), Tujuan dari sebuah program adalah untuk membuat strategi yang berorientasi pada tindakan yang telah dilakukan sebelumnya
2. Anggaran (*Budgets*), Setelah program dikembangkan, maka penyusunan anggaran mulai direncanakan.
3. Prosedur (*Procedures*), Setelah program, divisi, dan anggaran perusahaan disetujui, prosedur harus dikembangkan

Inovasi sebagai Strategi Digitalisasi

The Oxford English Dictionary dalam Brennen (2015) mendefinisikan Digitalization refers to “*the adoption or increase in use of digital or computer technology by an organization, industry, country, etc*”. Artinya adalah Digitalisasi lebih mengacu

pada adopsi atau peningkatan penggunaan teknologi digital atau komputer oleh organisasi, industri, negara, dll.

Selanjutnya Legner dalam Frenzel., dkk (2021) "*the manifold sociotechnical phenomena and processes of adopting and using these technologies in broader individual, organizational, and societal contexts*". Artinya adalah Digitalisasi merupakan fenomena sosioteknik yang beragam dan proses mengadopsi dan menggunakan teknologi ini dalam konteks individu, organisasi, dan masyarakat yang lebih luas.

Sedangkan pendapat dari Gartner dalam Rumpe (2015) "*Digitalization is the use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value-producing opportunities; it is the process of moving to a digital business.*" Artinya Digitalisasi merupakan penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis dan memberikan pendapatan baru. dan peluang yang menghasilkan nilai; ini adalah proses pindah ke bisnis digital.

Maka, berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan digitalisasi merupakan sebuah proses adaptasi seluruh aktivitas atau kegiatan di sektor pemerintahan maupun swasta dalam menggunakan teknologi digital untuk mencapai suatu efektivitas dalam suatu organisasi.

Digitalisasi sebagai inovasi Pelayanan Publik

Inovasi mencakup ide baru yang dituangkan menjadi sebuah proses, produk, maupun sebuah layanan baru yang mengarah pada pertumbuhan pembangunan nasional (Kogabayev and Maziliauskas, 2017) . Digitalisasi merupakan inovasi yang tepat dalam melestarikan pelayanan publik di era pandemi Covid-19 ini. Inovasi digital yaitu menginovasi suatu produk, proses, atau model bisnis dan pelayanan dengan menggunakan platform teknologi digital sebagai sarana atau tujuan dalam menangani suatu hambatan dan tantangan yang terdapat dalam sebuah organisasi.

E-Government merupakan salah satu teknologi informasi yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 menyebutkan penyelenggaraan sistem elektronik adalah setiap orang, negara, masyarakat, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk keperluan dirinya/atau keperluan pihak lain.

Kusnadi dalam Tasyah., dkk (2021) mengatakan ada dua aktivitas yang mencakup dalam penerapan teknologi informasi antara lain :

- a. Mengelola data, informasi, antara manajemen dan proses kerja berhubungan secara Otomatis
- b. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang mudah diakses dan juga murah untuk masyarakat

Ekonomi Digital

Ekonomi digital merupakan sebuah inovasi yang dibentuk oleh para pelaku usaha untuk menggunakan informasi digital serta jaringan internet untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi serta menjangkau pasar secara luas serta menghemat biaya operasional (Aprilianti dkk., 2021).

Berdasarkan pendapat dari Lauscher dalam Williams (2021) Ekonomi Digital merupakan “*The internet intelligence age where it is not just about the network technology, intelligence machine, but concerning the human using technology, which interlinks creativity, knowledge and intelligence for breakthrough in the formation of social and wealth development*”. Artinya ekonomi digital adalah dimana era kecerdasan internet bukan hanya tentang teknologi jaringan, mesin kecerdasan, tetapi tentang manusia yang menggunakan teknologi, yang menghubungkan kreativitas, pengetahuan, dan kecerdasan untuk terobosan dalam pembentukan pembangunan sosial dan kekayaan.

Maka, beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Digital merupakan suatu kegiatan yang mencakup manusia dan teknologi dalam mengintegrasikan teknologi digital dalam mengoptimalkan bisnis ekonomi sebagai bentuk kreativitas, pengetahuan, dan kecerdasan untuk terobosan dalam pembentukan pembangunan sosial dan kekayaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan). Penelitian ini difokuskan pada implementasi strategi yang dideskripsikan melalui unsur-unsur implementasi yaitu : program-program (*programs*), anggaran (*budgets*) dan prosedur (*procedures*) juga faktor-faktor penghambat dalam implementasi strategi.

Adapun data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan key informan dan informan. Key Informan dalam penelitian ini yaitu Pengawas Ahli Muda Provinsi Kalimantan Timur dan Pengawas Ahli Muda Kota Samarinda dan informan dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang telah mengikuti program dan kegiatan penggunaan teknologi digital yang diselenggarakan oleh Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim. Sementara data sekunder didapatkan melalui beberapa literatur dan arsip-arsip serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data menggunakan model interaktif dari (Miles dkk., 2020) yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Strategi dalam Melakukan Digitalisasi pada UMKM

Wheelen and Hunger (2004) berfokus pada penjabaran unsur-unsur implementasi strategi yang meliputi program-program (*programs*), anggaran (*budgets*) dan Prosedur (*Procedures*).

a. Program yang Mengacu pada Penggunaan Teknologi Digital (Programs)

Program dibentuk atas tindakan sebelumnya, mengacu pada pendekatan implementasi strategi dalam mewujudkan strategi yang bersinergi terdapat beberapa indikator yang dipertimbangkan sehingga program harus berorientasi pada strategi yang sudah dicanangkan sebelumnya. Dewasa ini, peran teknologi dapat merubah kebiasaan masyarakat sehari-hari terutama dunia usaha (Octavina dkk., 2021). Oleh

karena itu, Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim berinovasi melalui Program pemberdayaan UMKM di Kota Samarinda, dituangkan melalui kegiatan pelatihan pemasaran online bagi UKM dan bimtek dan pendampingan pendaftaran LPSE dan E-katalog LKPP bagi para pelaku UMKM yang bertujuan untuk menunjang digitalisasi UMKM di Kota Samarinda. Kemudian Disperindagkop Kota Samarinda melalui program LAPERWALUH "Layanan Pemasaran Whatsapp Kelurahan" menggait para pelaku UMKM terutama yang baru merintis usahanya untuk bergabung dalam grup per kelurahan yang berisikan 100 hingga 500 konsumen sehingga para pelaku UMKM dapat mempromosikan produknya hanya melalui whatsapp.

Digitalisasi menjadi suatu hal yang tak terelakan sehingga menjadi suatu solusi bagi para UMKM di Indonesia (Wijoyo dkk., 2020). Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim terdorong untuk melakukan pembaruan kepada UMKM Kalimantan Timur terutama Kota Samarinda. Adanya kesadaran individu akan teknologi begitu penting dalam proses penyebaran inovasi digitalisasi (Handini., 2021) Sebelum program tersebut dilaksanakan, adanya antusiasme dari pelaku UMKM juga terlihat dari adanya keingintahuan para pelaku UMKM terhadap ekonomi digital. Dalam pelaksanaannya jumlah pelaku UMKM yang ingin berpartisipasi berjumlah lebih dari 30 orang per kegiatan namun hal tersebut dibatasi dengan melakukan seleksi berkas dan yang menjadi solusi bagi para pelaku UMKM yang tidak berkesempatan datang secara offline maka kegiatan secara online pun turut dilangsungkan dengan kegiatan yang dilakukan secara offline.

b. Anggaran dalam Implementasi Program (Budgets)

Dalam implementasi strategi, program tidak dapat dijalankan tanpa adanya dukungan dari anggaran. Adapun sumber anggaran mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim bersumber dari APBN dan APBD. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menuliskan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus anggaran daerah tersebut dengan meminimalkan campur tangan pemerintah pusat dengan melibatkan beberapa pihak yaitu eksekutif dan legislatif. Besaran biaya pada program pengembangan UMKM secara khusus mencakup kegiatan digitalisasi pada UMKM memperoleh anggaran sebesar Rp. 500.000.000 pada tahun anggaran 2021.

Kemudian pada tahun 2022 pada program pengembangan UMKM secara khusus mencakup kegiatan digitalisasi pada UMKM memperoleh anggaran sebesar Rp. 701.000.000. Namun, anggaran tersebut dinilai masih kurang untuk mencakup hasil kegiatan yang optimal. Oleh karena itu, Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim menyesuaikan jumlah kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Bappeda Kaltim selaku perencanaan keuangan dan program di Provinsi Kalimantan Timur.

Anggaran merupakan alat pengendalian dalam melaksanakan seluruh rangkaian program dan kegiatan di suatu instansi serta menjadi penopang dalam berjalannya suatu kegiatan. Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim seperti yang tercantum pada dokumen perencanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 dan 2022 peneliti menganalisis bahwa jumlah anggaran dan realisasi anggaran pada tahun tersebut memiliki selisih dengan rata-rata di atas 90%. Berdasarkan hasil

penelitian di atas, Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim dapat merealisasikan program dan kegiatan selama setahun berjalan dengan optimal. Efektivitas Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim sebagai pelayan publik telah memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat secara khusus pada para pelaku UMKM.

c. Prosedur dalam Implementasi Program (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan acuan bagi para stakeholder dalam menjalankan suatu program atau kegiatan. Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim telah memiliki SOP kegiatan digitalisasi melalui program pengembangan UMKM secara khusus ketika diadakannya pelatihan. SOP tersebut merinci berbagai alur dalam membuat suatu program. Selain itu, adanya SOP dalam kegiatan pelatihan tersebut sudah cukup mempermudah para pelaku UMKM untuk mengetahui alur pendaftaran sebagai peserta pelatihan yang tertera pada pamflet hasil penelitian. SOP tersebut telah disosialisasikan melalui media sosial Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim dimana para pelaku UMKM yang lolos seleksi berkas untuk hadir dalam pelatihan offline juga wajib memiliki persyaratan-persyaratan seperti wajib memiliki NIB dan PIRT. Adapun yang menjadi kekurangan karena persyaratan-persyaratan tersebut tidak langsung dilampirkan pada *pamphlet*.

Namun dari segi format, SOP kegiatan pelatihan tersebut telah disusun dengan alur yang sederhana sehingga membuat masyarakat awam (Para pelaku UMKM) dapat dengan mudah memahami alur tersebut. Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim telah memiliki SOP dan telah menggunakan SOP tersebut dengan baik dan telah diterapkan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu, di dalam alur SOP juga dilakukan koordinasi dengan instansi kab/kota sehingga kegiatan yang nantinya akan dijalankan akan berjalan secara optimal.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Strategi Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim

Dalam proses implementasinya ditemukan beberapa faktor yang menghambat maksimalnya implementasi strategi tersebut. Kota Samarinda terkadang memiliki sinyal yang kurang baik di beberapa tempat tertentu sehingga menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk melakukan unggahan terhadap produk yang akan dipromosikan di media sosial secara masif. Dalam hal ini, Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim yang menyebutkan terkait hambatan jaringan hanya pada UMKM yang tinggal di daerah blankspot yang tidak dapat mengakses internet sehingga terpaksa masih berjalan secara offline.

Adapun kendala yang dialami dari Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim mengalami hambatan dalam menjangkau seluruh sektor UMKM. Digitalisasi tentunya perlu diterapkan seluruh jenis UMKM tanpa terkecuali. Sulitnya menjangkau para pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam program digitalisasi adalah banyaknya para pelaku UMKM yang berada di atas usia produktif yakni 40 tahun keatas sehingga banyak yang lebih memilih berjualan secara konvensional. Hal tersebut memicu kurangnya minat para pelaku UMKM untuk tertarik dan tidak mampu dalam melakukan penjualan secara online.

Kemudian kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM ditemukan bahwa kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi digital dilihat dari respon UMKM itu sendiri. Ekonomi digital merupakan sebuah inovasi yang dibentuk oleh para pelaku usaha untuk menggunakan informasi digital serta jaringan internet untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi serta menjangkau pasar secara luas serta menghemat biaya operasional. Namun pada kenyataannya setelah mengikuti beberapa pelatihan menimbulkan beberapa hambatan yang dialami oleh Ketidakmampuan beradaptasi dalam pemasaran melalui e-commerce.

Dalam mengatasi hambatan tersebut saat ini Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim berupaya untuk tetap membina dan merangkul melalui sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran pada para pelaku UMKM akan pentingnya teknologi digital dalam menopang para pelaku UMKM yang terdampak oleh pandemi Covid-19 di Kota Samarinda.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi strategi oleh Disperindagkop UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam mengoptimalkan digitalisasi UMKM Kota Samarinda di masa pandemic Covid-19 telah berjalan baik. Namun di dalam proses implementasinya terdapat beberapa hambatan sehingga penyelenggaraannya belum dapat berjalan secara optimal.

Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim memiliki program pemberdayaan UMKM yang dituangkan melalui kegiatan bimtek dan pendampingan pendaftaran LPSE dan Ekatalog LKP, pelatihan pemasaran online bagi UKM serta program LAPERWALUH oleh Disperindagkop UKM Kota Samarinda. Adapun anggaran pada program digitalisasi yang dilaksanakan oleh Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim bersumber pada APBN dan APBD. Dalam realisasi anggarannya peneliti melihat bahwa perbedaan antara anggaran dan realisasi anggaran tersebut penggunaannya telah masuk dalam kategori optimal. Hal tersebut didukung dengan hasil analisis peneliti dengan menghitung persentase perbedaan anggaran dan realisasi anggaran yang menduduki rata-rata diatas 90%. SOP yang terdapat dalam program dan kegiatan telah ada dan dilaksanakan dengan baik. SOP tersebut mencakup SOP kegiatan pelatihan UMKM dan SOP program telah dilaksanakan dan sudah berfungsi dengan baik dengan melibatkan beberapa instansi mengenai koordinasi dan informasi terkait adanya kegiatan atau program pemberdayaan UMKM dengan melakukan digitalisasi kepada seluruh UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Samarinda

Faktor penghambat dalam implementasi strategi yang dialami oleh Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim dan pelaku UMKM adalah sinyal jaringan internet yang kurang baik di tempat tertentu, masih ada UMKM yang lebih memilih berjualan secara konvensional dibandingkan berjualan online dan masih terdapat UMKM yang tidak paham dalam memanfaatkan teknologi digital.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pihak-pihak sebagai berikut.

1. Melakukan perbaikan karena jaringan internet tidak hanya berdampak pada pelaku UMKM aja tetapi juga masyarakat sebagai customer sehingga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2. Memaksimalkan sosialisasi pemasaran secara online bagi para pelaku UMKM. Banyaknya para pelaku UMKM yang berjualan konvensional adalah kurangnya informasi terkait pelatihan dan bimtek yang diadakan pemerintah. Hal ini tentu dilakukan sosialisasi secara rutin agar para pelaku UMKM dapat memiliki pengetahuan pentingnya penggunaan teknologi digital bagi para pelaku UMKM di Kota Samarinda.
3. Perlu adanya dilakukan pendampingan serta pembinaan oleh Disperindagkop Provinsi Kaltim agar selepas program para UMKM tetap dilakukan pemantauan terkait progress usahanya agar para pelaku UMKM juga merasakan dampak yang signifikan setelah mengikuti program-program yang diusung oleh Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim bagi para pelaku UMKM di Kota Samarinda

Daftar Pustaka

- Adella, L., and Rio, M. 2021. Digitalisasi UMKM, Literasi Keuangan, dan Kinerja Keuangan : Studi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Business and Banking* 11(1): 73–92. DOI: 10.14414/jbb.v11i1.2552
- Aprilianti, I., and Dina, S. A. 2021. Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia. *Center for Indonesian Policy Studies* (30): 1–38.
- Astuti, R. P., Kartono, K., and Rahmadi, R. 2020. Pengembangan UMKM melalui Digitalisasi Tekonolgi dan Integrasi Akses Permodalan. *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 8(2): 248–256. DOI: 10.29313/ethos.v8i2.5764
- Frenzel, A., Muench, J., Bruckner, M., and Veit, D. 2021. Digitization or digitalization? – Toward an understanding of definitions, use and application in IS research. in: *AMCIS 2021 Proceedings* 1–11.
- Gray, J., and Rumpe, B. 2015. Models for digitalization. *Software and Systems Modeling* Springer Berlin Heidelberg 14(4): 1319–1320. DOI: 10.1007/s10270-015-0494-9
- Ilham, M., Apriani, F., and Khaerani, T. R. 2022. Implementasi Strategi Pembangunan Bidang Fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. 9(4): 5802–5815.
- J. Scott Brennen, D. K. 2015. Digitalization. *The Routledge Reader on the Sociology of Music* 329–338. DOI: 10.4324/9780203736319-36
- Komunikasi, B. 2021. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021 : Produk Artisan Indonesia. *Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi* <<https://maritim.go.id/gerakan-nasional-bangga-buatan-indonesia-gernas-bbi-2021/>>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., and Saldana, J. 2020. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Sage Publications, California.
- Novita, Diana, E. a. 2021. Dampak Covid-19 Melalui Digitalisasi UMKM. *Prosiding SEMinar Stiami*. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr49scaUQJIBE4PspdXNyoA;_ylu=Y29sbwNn cTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1694679451/RO=10/RU=https%3

- a%2f%2fojs.stiami.ac.id%2findex.php%2fPS%2farticle%2fview%2f1394/RK=2/R
S=Fjoo8ploLf2lv5tK0IMxvprDEIY-
- Nugroho, B. A., Budiman, P. W., and Wahyuningsih, N. 2019. Analisis Persepsi Usaha Mikro Terhadap Pemanfaatan Media Daring Di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan* 79. DOI: 10.36087/jrp.v1i2.37
- Suci, R. P. 2015. *Esensi Manajemen Strategi*. Zifatama Publisher, Sidoarjo. DOI: 10.1088/1751-8113/44/8/085201
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., and Tresiana, N. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 18(2): 212-224. DOI: 10.31113/jia.v18i2.808
- Virgia Aida Handini, W. C. 2021. Digitalisasi UMKM sebagai Hasil Inovasi dalam Komunikasi Pemasaran Sahabat UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Komunikasi*.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOrEk.UQJlrCoPUOZXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1694679487/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.untirta.ac.id%2findex.php%2fJRKom%2farticle%2fview%2f9682/RK=2/RS=kit4VgMQwOWFPVAUjBTeJMOIKS0-
- Wheelen, T. L., and Hunger, J. D. 2004. *Strategic Management and Business Policy*. Prentice Hall.
- Wijoyo, H., and Widiyanti. 2020. Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Kahuripan*.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrg1aNUUQJl0ZcPz0tXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1694679509/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f346518202_DIGITALISASI_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MENENGAH_UMKM_DI_ERA_PANDEMI_COVID-19/RK=2/RS=CoBlwbqRNkzUMPs8cEHlgj1bDLs-
- Williams, L. D. 2021. Concepts of Digital Economy and Industry 4.0 in Intelligent and information systems. *International Journal of Intelligent Networks Elsevier Ltd* 2(July): 122-129. DOI: 10.1016/j.ijin.2021.09.002
- Yunus, E. 2016. *Manajemen Strategis*. Penerbit Andi, Yogyakarta.